

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Komparatif pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Bandung)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Widiyawati

184020118



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2024**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Komparatif Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Bandung)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pasundan

Bandung, 19 September 2024

Mengetahui,

Pembimbing,

Mochammad Ridwan, S.E., Ak., M.Si.,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. H. Juanim, S.E., M.Si

Isye Siti Aisyah, S.E., M.Si., Ak., CA

ABSTRAK

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dengan membandingkan perbedaan dan kesamaan kinerja dalam dua wilayah berbeda. Studi yang digunakan menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang di peroleh dari berbagai dokumen , situs web, buku dan sebagainya.

Dari hasil penelitian terbukti bahwa : (1) *Good governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. (2) Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (3) Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (4) komitmen organisasi juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota Bandung.

Kata Kunci : *good governance*, komitmen organisasi, budaya organisasi, pengendalian internal.

ABSTRACT

Factors that Influence Regional Government Performance. The aim of this research is to understand the factors that influence local government performance by comparing the differences and similarities in performance in two different regions. The study used used a comparative descriptive method with a qualitative approach. The data sources used are secondary data obtained from various documents, websites, books and so on.

From the research results, it is proven that: (1) Good governance has a positive influence on local government performance. (2) Internal control influences the performance of local government (3) Organizational culture has a positive influence on the performance of regional government (4) organizational commitment also greatly influences the performance of the regional government of Bandung Regency and City.

Keywords: *good governance, organizational commitment, organizational culture, internal control.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah dan innayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Komparatif pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Bandung)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak tidak mungkin penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terutama tertuju kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Dadang dan Ibunda tercinta Heni Suryani yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir dan tidak lupa Bapak Mochammad Ridwan, S.E., Ak., M.Si., CA., A-CPA., PFM. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan, dukungan serta sarannya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pasundan.
3. Dr. H. Juanim, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Dr. Ina Ratnamasih, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
5. Bapak Mochammad Ridwan, S.E., M.Si., AK. CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Ibu Endang Rostiana, SE., MT Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Ibu Isye Siti Aisyah, SE., M.Si., Ak., CA. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
8. Bapak Mochammad Ridwan, S.E., Ak., M.Si., CA., A-CPA., PFM. sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
9. Dr. Ruslina Lisda, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Wali kelas 18AKC Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Pasundan.
11. Seluruh Staf tata usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan,terima kasih bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Pasundan.
12. Bapak Dadang Hidayath dan Ibu Heni Suryani selaku Orangtua yang mendukung dalam segala bentuk tenaga, biaya, dan support terbaik bagi penulis.

13. Annisa Nur Hidayah selaku adik yang selalu mendengarkan dan memberikan support terhadap penulis.
14. Muhamad Rizal serta keluarga dan kerabat yang telah menjadi support bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dari segi bahasa, penyusunan, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya menjadi tolak ukur untuk menjadi lebih baik bagi penulis dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang memerlukan baik dalam lingkup kampus maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua orang membutuhkannya sebagai bahan referensi atau pembelajaran.

Bandung, September 2024

Widiyawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, PENELITIAN TERDAHULU DAN HIPOTESIS	20
2.1 Kajian Pustaka.....	20
2.1.1 <i>Good Governance</i>	20
2.1.1.1 Definisi <i>Good governance</i>	20
2.1.1.2 Prinsip Prinsip <i>Good Governance</i>	21
2.1.1.3 Manfaat <i>Good Governance</i>	27
2.1.1.4 Tujuan <i>Good Governance</i>	27
2.1.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Good Governance</i>	28
2.1.2 Komitmen Organisasi.....	30
2.1.2.1 Pengertian Komitmen Organisasi.....	30
2.1.2.2 Indikator Komitmen Organisasi.....	32

2.1.3	Budaya organisasi.....	34
2.1.3.1	Pengertian Budaya Organisasi	34
2.1.3.2	Fungsi Budaya Organisasi	37
2.1.3.3	Manfaat Budaya Organisasi	37
2.1.3.4	Indikator Budaya Organisasi.....	38
2.1.4	Pengendalian Internal.....	38
2.1.4.1	Definisi Pengendalian Internal.....	38
2.1.4.2	Tujuan Pengendalian Internal	40
2.1.4.3	Indikator Pengendalian Internal.....	43
2.1.4.4	Keterbatasan Pengendalian Internal	55
2.1.5	Kinerja Instansi Pemerintah	56
2.1.5.1	Definisi Kinerja Instansi Pemerintah.....	56
2.1.5.2	Arti Penting Kinerja Instansi Pemerintah.....	58
2.1.5.3	Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah.....	59
2.1.5.4	Dimensi Kinerja Instansi Pemerintah.....	61
2.1.5.5	Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja	64
2.1.6	Penelitian Terdahulu	65
2.2	Kerangka Pemikiran	69
2.2.1	Pengaruh <i>Good Governace</i> Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	69
2.2.2	Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	71
2.2.3	Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	72
2.2.4	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	73
2.3	Hipotesis	74
BAB III METODE PENELITIAN.....		76
3.1	Metode Penelitian yang Digunakan.....	76
3.1.1	Objek Penelitian	76

3.1.2	Unit Penelitian	76
3.1.3	Instrumen Penelitian	77
3.1.4	Metode Penelitian	78
3.1.5	Pendekatan Penelitian	79
3.1.6	Model Penelitian	80
3.2	Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel	82
3.2.1	Definisi Variabel	82
3.2.2	Operasionalisasi Variabel	84
3.3	Populasi dan Sampel	90
3.3.1	Populasi	90
3.3.2	Sampel	92
3.3.3	Teknik <i>Sampling</i>	94
3.4	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	95
3.4.1	Sumber Data	95
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data	95
3.5	Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis	96
3.5.1	Metode Analisis Data	96
3.5.1.1	Metode Transformasi Data	102
3.5.1.2	Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.5.1.3	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	104
3.5.1.3.1	Uji Validitas Instrumen	104
3.5.1.3.2	Uji Realibilitas Instrumen	105
3.5.1.4	Rancangan Analisis	106
3.5.1.4.1	Analisis Regresi Linier Berganda	107
3.5.1.4.2	Analisis Koefisien Korelasi (R)	108
3.5.2	Rancangan Pengujian Hipotesis	109
3.5.2.1	Uji Parsial (<i>t-test</i>)	109
3.5.2.1	Koefisien Determinasi (R^2)	112
3.6	Rancangan Kuesioner	113
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		114
4.1	Hasil Penelitian	114

4.1.1	Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten dan Kota Bandung	114
4.1.1.1	Sejarah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten dan Kota Bandung	114
4.1.1.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota Bandung	131
4.1.1.3	Uraian Tugas Dinas SKPD Pemerintahan Kabupaten/Kota Bandung	133
4.1.1.4	Aktivitas Dinas.....	135
4.1.2	Karakteristik Responden	136
4.2	Analisis Data	138
4.2.1	Statistik Deskriptif	138
4.2.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	139
4.2.2.1	Uji Validitas	139
4.2.2.2	Uji Reliabilitas	142
4.2.3	Pengujian Hipotesis	143
4.2.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	143
4.2.2.3	Uji Hipotesis (Uji t)	145
4.2.2.4	Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F)	148
4.3	Pembahasan.....	150
4.3.1	Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pemerintah....	150
4.3.2	Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah	151
4.3.3	Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah...	152
4.3.4	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah	152
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		154
5.1	Simpulan.....	154

5.2	Saran	155
5.3	Keterbatasan Penelitian	156
DAFTAR PUSTAKA		157
LAMPIRAN		159

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	66
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Independen (X_1)	84
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Independen (X_2)	85
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel Independen (X_3)	86
Tabel 3.4	Operasionalisasi Variabel Independen (X_4)	87
Tabel 3.5	Operasionalisasi Variabel Dependen (Y)	89
Tabel 3.6	Populasi Penelitian Kabupaten Bandung	91
Tabel 3.7	Populasi Penelitian Kota Bandung	92
Tabel 3.8	Keterangan Sampel Penelitian	93
Tabel 3.8	Ukuran Alternatif Jawaban Kuesioner	97
Tabel 3.9	Intrepretasi Koefisien Korelasi	108
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	136
Tabel 4.2	Data Responden Berdasarkan Usia	137
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	137
Tabel 4.4	Data Responden Berdasarkan Lama Kerja	138
Tabel 4.5	Hasil Uji Statik Deskriptif	138
Tabel 4.6	Uji Validitas <i>Good Governance</i>	140
Tabel 4.7	Uji Validitas Komitmen Organisasi	140
Tabel 4.8	Uji Validitas Budaya Organisasi	141
Tabel 4.9	Uji Validitas Pengendalian Internal	141
Tabel 4.10	Uji Validitas Kinerja Pemerintah	142
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas	143
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	143
Tabel 4.13	Model Summary	144
Tabel 4.14	Hasil Uji Pengaruh	146
Tabel 4.15	Uji Simultan	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Penelitian	81
Gambar 3.1 Uji Dua Pihak.....	110
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung	131
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Bandung	131
Gambar 4.3 Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 pada Uji Pengaruh	147
Gambar 4.3 Grafik Uji Simultan	150

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja instansi pemerintah daerah adalah sebuah gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah organisasi sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas amanat yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah. Maka kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode.

Selain itu, publik juga menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan.

Kinerja instansi pemerintah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu. Tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011).

Pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat dituntut untuk melaksanakan amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran untuk penyelenggaraan di tingkat pusat maupun daerah.

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 melahirkan pergeseran kewenangan pemerintah daerah, dari yang semula sentralistik birokratik menjadi pemerintahan yang desentralistik partisipatoris. Ada dua alasan mengapa perubahan ini harus dilakukan, yaitu pertama adalah pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. Kedua adalah Tuntutan publik akan pemerintah yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Menurut PP No. 8 tahun 2008 pasal 2 dijelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Maka, selain pelaporan keuangan, pemerintah juga harus membuat informasi mengenai prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Kinerja instansi pemerintah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam periode tertentu.

Tujuan yang spesifik berfungsi sebagai motivator yang menyebabkan orang-orang membandingkan kapasitas mereka saat ini yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011:34).

Menurut Chabib dan Suripto (2011:12-16) terdapat beberapa dimensi yang perlu memperoleh perhatian dalam menilai atau mengukur kinerja pemerintah daerah, yaitu :

1. Dimensi keuangan, dimensi ini meliputi kemampuan pemda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan PAD dan mengurangi celah fiskal daerah serta kemampuan pemda dalam memperbaiki struktur belanja daerah. Hal ini penting, mengingat dewasa ini persentase belanja pegawai pada umumnya masih sangat besar dibandingkan dengan belanja modal.

2. Dimensi kepuasan masyarakat daerah, tingkat kepuasan masyarakat tentu akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat besarnya harapan atas pelayanan yang seharusnya diberikan. Kewajiban pimpinan unit organisasi dilingkungan pemerintah daerah secara terus menerus menggali informasi atas tingkat pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dan meresponnya dalam bentuk tindakan nyata, sesuai harapan masyarakat yang menggajinya.
3. Dimensi operasi kegiatan, informasi operasional kegiatan secara internal sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa secara keseluruhan berfokus pada upaya pencapaian misi dan visi kepala daerah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Dimensi kepuasan pegawai, pegawai adalah aset terpenting yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini tidak dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi harus dinilai berdasarkan mutu atau kualitasnya.
5. Dimensi kepuasan para pemangku kepentingan, kinerja pemda sering diukur berdasarkan sudut pandang dan kepentingan para pihak yang jadi pemangku kepentingan, informasi kinerja pemda perlu didesain dan disusun berdasarkan kebutuhan dari para pemangku kepentingan seperti DPRD, pemasok, pelanggan, bahkan masyarakat luas akan memperoleh gambaran kinerja pemerintah daerah sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan mereka masing-masing.
6. Dimensi waktu, ukuran waktu merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah daerah dalam mendesain pengukuran kinerja. Ketetapan waktu penyampaian menjadi penting, oleh karena informasi tersebut merupakan bahan bagi semua pihak yang memerlukan informasi dalam pengambilan keputusan.

Pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah sangat penting dilakukan, karena dapat dijadikan sebagai alat motivasi dalam meningkatkan kinerja di periode selanjutnya, dengan cara memperbaiki masalah-masalah yang sebelumnya terjadi. Selain itu, pelaporan kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat mendemonstrasikan proses akuntabilitas instansi pemerintah sehingga instansi pemerintah tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan programnya.

Fenomena yang terjadi di instansi pemerintah daerah yaitu pada tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung soroti kinerja pejabat di enam Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkot Bandung yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan